RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN SAWAHAN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan Hidayah-Nya, sehingga dapat terselenggara penyusunan Rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Hasil Review Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk merupakan Rancangan Akhir Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pemerintah Daerah dan dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan. Oleh karena itu diperlukan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Sawahan.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis di masa yang akan datang.

Sawahan,10 Maret 2022

CAMAT SAWAHAN

SUKIRNO,S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19690807 199003 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kec. Sawahan

2.2. Sumber Daya Kec. Sawahan

2.3. Kinerja Pelayanan Kec. Sawahan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Sawahan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kec. Sawahan

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama

7.2. Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Rancangan Akhir Kecamatan Sawahan Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Sawahan Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Sawahan Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sawahan Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sawahan Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Sawahan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
2. Renstra Kecamatan Sawahan Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang dilanjutkan dengan pemberian pembekalan tugas tim melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan Renstra serta kegiatan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Renstra. Proses selanjutnya berturut-turut adalah penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek), penyusunan Rancangan Awal (Ranwal), penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir (Rankhir) hingga penetapan Renstra dengan Peraturan Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
   a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istemewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
   b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3851);
   c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
   d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66);

f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;

p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Taahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Dipindai dengan CamScanner

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

v. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);

w. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05 seri E);

x. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2016 nomor 9)

y. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

z. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan RPJMD

Dipindai dengan CamScanner

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sawahan ini adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Sawahan guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat sebagi penyikapan atas adanya perubahan peraturan yaitu dengan adanya peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang **Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD)** yang mana aturan tersebut menyebabkan berubahnya tata carapenyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah.Sehingga diperlukan review atas dokumen Rencana Strategis yang telah ada.

Sedangkan tujuan disusunnya Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sawahan ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam mentapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan;
3. Sebagai Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SAWAHAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sawahan

2.2 Sumber Daya Kecamatan Sawahan

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sawahan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sawahan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS KECAMATAN SAWAHAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sawahan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SAWAHAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sawahan

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 28Tahun 2021tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Sawahan.

1. Tugas Pokok

   Tugas pokok Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

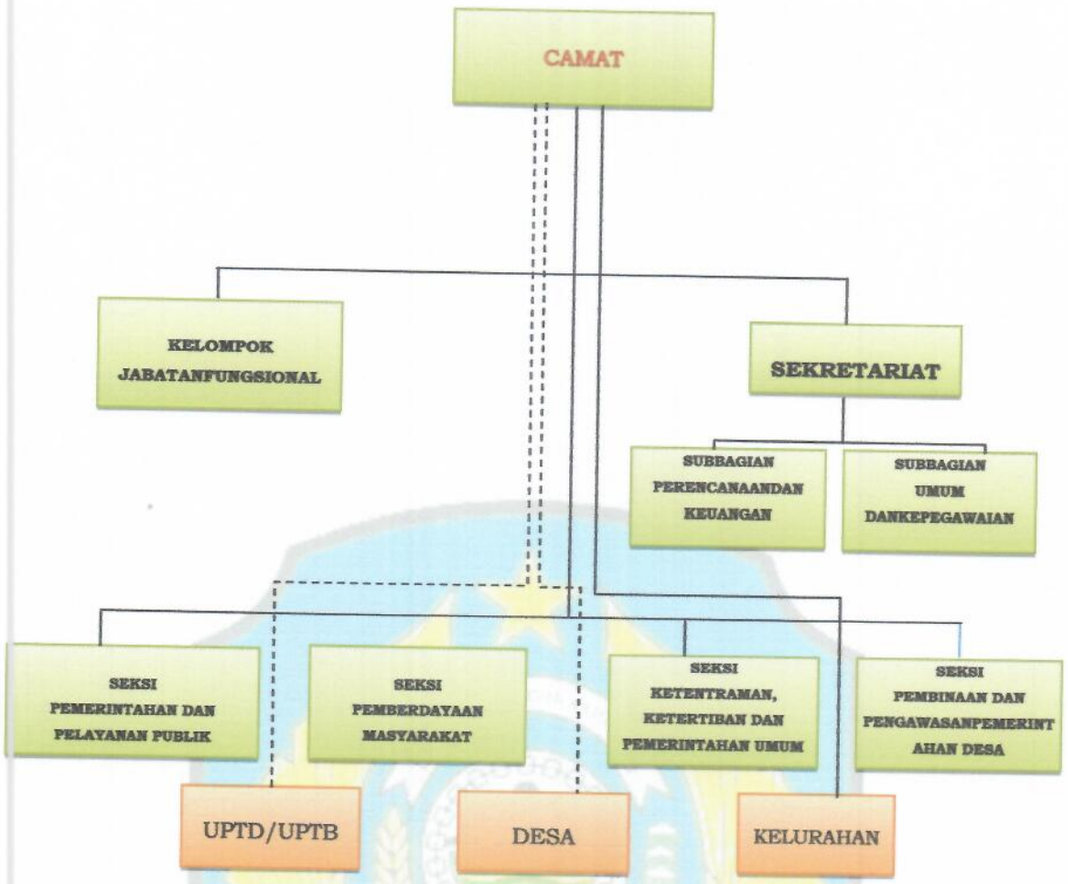
   a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
   d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 28Tahun 2021.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata KerjaKecamatan SAWAHANKabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

A. CAMAT

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerahadalah :

1) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2) pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

4) pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7) pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
8) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
9) pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa..

B. **SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1) penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2) pengelolaan urusan keuangan;
3) pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4) pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
- melaksanakan pengelolaan keuangan;
- menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
- melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
- melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

C. SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1) melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2) melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3) melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4) melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
5) melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
6) melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
7) melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8) melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
9) melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;

10) melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan

D. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1) melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
2) melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
3) melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
4) melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
5) melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
6) melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. SEKSI KETENTRAMAN KETERIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

1) melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
2) melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
3) melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

4) melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
5) melaksanakanfasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
6) melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
7) melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
8) melaksanakanpenanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9) melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
10) melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
11) melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
12) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

1) melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2) melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3) melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4) melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
6) melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

7) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
8) melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9) melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
10) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
11) melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
12) melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
13) melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14) melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
15) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Sawahan

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kantor Kecamatan Sawahan belum terisi lengkap, yang seharusnya 8 orang untuk sat ini baru terisi sebanyak 4 orang yang dibantu oleh 14 orang staf. Dengan rincian sebagai berikut:

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sawahan

Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

No.	Nama	Jml. Pegawai
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Camat	1
3.	Kasi	-
4.	Kasubbag	2
5.	Staf	14
Jumlah		18

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Camat Sawahan

2 Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Sawahansebagai berikut :

Tabel 2.2

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sawahan

Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2021

No.	Pangkat	Gol/Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tk.I	IV/b	-
2.	Pembina	IV/a	1
3.	Penata Tk. I	III/d	4
4.	Penata	III/c	-
5.	Penata Muda Tk.I	III/b	-
6.	Penata Muda	III/a	1
7	Pengatur Tk I	II/d	10
8.	Pengatur	II/c	1
9	Pengatur Muda Tk I	II/b	1
10	Pengatur Muda	II/a	-
11	Juru Tk I	I/d	-
Jumlah			18

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Camat Sawahan

3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Sawahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sawahan

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2021

No.	Nama	Jml. Pegawai
1.	S2	1
2.	S1	4
3.	DIV	-
4.	D3	-
5.	SMA	12
6.	SMP	1
Jumlah		18

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Camat Sawahan

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Sawahan terdiri dari :

a. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK/RA dan SD/MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun menajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya;
b. Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah;
c. Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) Memiliki tugas fungsional antara lain:
    - Koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua

kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;

- Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;
- Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
- Melakukan dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;

d. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian;

e. Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan;

f. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) mempunyai tugas fungsional pokok yang dikemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, meliputi pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

B. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasimeliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit luas 1.372 meter persegi yang digunakan untuk kegiatan administrasi

pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:

3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
   - Roda empat,1 (satu) unit yaituPanther Turbo Tahun 2014
   - Roda dua, 2 (dua)Unit yaitu :
     - 1 (satu) unit Honda Supra X 125 Tahun 2006
     - 1 (satu) unit Yamaha Vixion Tahun 2015
4. Peralatan inventaris kantor lainnya dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Meja Kerja	:	17 buah
- Meja layanan	:	1 buah
- Kursi	:	17 buah
- Bangku Panjang	:	3 buah
- Komputer khusus KTP SIAK	:	1 (satu) unit
- Komputer e-KTP	:	1 (satu) unit
- Laptop	:	7 (tujuh) unit
- Mesin Ketik	:	1 (satu) buah
- Almari besi	:	1 (satu) buah
- Rak Kayu	:	2 (dua) buah
- Filling besi/metal	:	3 (tiga) buah
- Brangkas	:	1 (satu) buah
- Almari Kayu	:	6 (enam) buah
- Printer	:	5 (lima) unit
- Telepon	:	1 (satu) unit

2.3 KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SAWAHAN

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sawahan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Peningkatan dan optimalisasi kinerja satuan unit kerja

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terhadap kinerja Kantor Kecamatan Sawahan, berikut ini dijelaskan kinerja Kantor Camat Sawahan per bidang pelayanan yaitu :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1) Pembinaan terhadap anggota Satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2) Peningkatan dan perwujudan Siskamling di tingkat, desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3) Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika serta Desa untukmelihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4) Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan Instansi terkait;
5) Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban, antara lain : Operasi PKL, Operasi WTS, Waria dan operasi pelajar serta operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait;
6) Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
7) Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, Satpol PP dan Puskesmas;
8) Melaksanakankegiatan lainnya seperti Perayaan HUT KemerdekaanRI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;.
9) Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
10) Melakukan Perencanaan dan Pengawasan Terhadap Pemilihan Kepala Desa
11) Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas blokdi desa.
12) Mengadakan pekan panutan PBB di desa.
13) Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas PBB sebelum jatuh tempo.

14) Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);
15) Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan Desa se Kecamatan Sawahan
16) Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
17) Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas seatap dan para sekretaris desa;
18) Mengadakan Rapat koordinasi beserta Kepala Desa, Sekretaris Desa se Kecamatan Sawahan setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi;
19) Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
20) Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di instansi di tingkat kecamatan;
21) Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Sawahan;
22) Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
23) Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
24) Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
25) Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan Masyarakat

1) Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3) Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4) Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
6) Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
7) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
8) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa/kelurahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
9) Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Sawahan;
10) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyakat (SANIMAS);
11) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera;
12) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
13) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat

1) Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
2) Monitoring penyaluran Jamkesgakin;
3) Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga ke Agamaan;
4) Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5) Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6) Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7) Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8) Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sawahan

Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian dan surat menyurat	800	890	845	900	950	856	923	802	982	967	107%	103,7%	94,9%	109,1%	101,7%
2	Jumlah koordinasi bidang ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah desa/kelurahan yang menyusun buku profil desa/kelurahan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%

4.	Jumlah fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disususun tepat waktu	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak	10	29	6	35	35	10	29	6	35	35	100%	100%	10%	100%	100%
7.	Jumlah peserta musrenbang kecamatan yang hadir	105	110	110	110	110	100	100	100	100	100	95,2%	90,9%	90,9%	90,9%	90,9%
8.	Jumlah pelayanan legalisasi surat menyurat dan pelayanan kependudukan	815	792	700	725	750	770	615	568	628	688	94,4%	77,6%	81,1%	86,6%	91,7%

Pencapaian target Renstra Kecamatan Sawahan tahun 2018-2023 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga untuk mengukur pencapaian kinerja dapat dilihat dari anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN (%)	REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	81.800.000	188.527.500				72.665.907	139.527.533				88,83	74					

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92.360.000	354.950.000				91.268.000	353.765.901				98,81	99,66					
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.500.000	4.281.000				3.490.000	1.962.000				99,71	45,83					
4.	Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	386.986.850					321.735.480					88,13						
5.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		119.139.100					14.603.600					96,19					

6.	Program Pembinaan Desa		24.997.000					24.350.000				97,89					
	SETELAH PERUBAHAN																
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.139.884.300	2.541.219.850	2.495.411.550			2.030.150.990				94,87				
2.	Progra, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			74.503.000	75.702.000	80.702.000			73.538.000				98,7				
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			116.201.000	55.755.000	51.670.000			75.981.000				65,38				

4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			15.890.000	24.176.700	30.070.000			15.890.000				100					
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			83.275.000	41.567.500	59.567.500			83.275.000				100					
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban					21.000.000												

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SAWAHAN

A. Tantangan

a. Kecamatan Sawahan jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian, akibatnya diperlukannya pengendalian yang lebih agar kegiatan perekonomian tersebut tidak membawa dampak negatif di masyarakat Kecamatan Sawahan
b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Sawahan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
e. TuntutanPemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal
f. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dikawasan perdesaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.
g. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
h. Income perkapita masyarakat masih rendah.
i. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.

B. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Pemerintah Kecamatan Sawahan antara lain :

a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
b. Adanya kepercayaan diri pimpinan daerah dan masyarakat kepada kecamatan Sawahan untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran kecamatan Sawahan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sawahan
e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sawahan, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Sawahan;
g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah

Kecamatan Sawahan. Seperti PNPM dan Alokasi Dana Desa (ADD);

i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Sawahan. Seperti PKH/BLT dan RASKIN.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KANTOR KECAMATAN SAWAHAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Nganjuk menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

A. Lingkungan Internal

1. Faktor Kekuatan (*Strong*)

a. Telah ditetapkannya Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 41Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Type B Kabupaten Nganjuk. Dalam Perda ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Sawahan;

b. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

c. Pola kerja di Kecamatan Sawahan yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif;

d. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

e. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;

f. SDM Aparatur Kecamatanyang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

2. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

a. Kurangnya pegawai di Kantor Kecamatan Sawahan dan di tingkat desa;

b. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

c. Belum terisinya beberapa jabatan struktural di Kantor Kecamatan Sawahan;

d. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;

e. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat MUSRENBANG masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.

f. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

g. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan

h. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

1. Faktor Peluang (*Opportunity*)

a. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;

2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
c. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
d. Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;
e. Ditetapkannya Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Faktor Ancaman (*Threat*)

a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
b. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
c. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Sawahan;
d. Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

3.2 TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Visi RPJMD yang merupakan visi Kepala Daerah Terpilih harus sejalan dengan visi jangka panjang Kabupaten Nganjuk, sebagaimana terdapat dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025.

Mengacu pada Visi RPJPD Kabupaten Nganjuk tersebut, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)"

Jika dikaitkan antara visi RPJMD Kabupaten Nganjuk dengan visi RPJMD Provinsi Jawa Timur serta visi RPJM Nasional, tampak adanya keterkaitan yang saling melengkapi. Sebagimana diketahui bahwa Visi RPJMN adalah : "Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur" dan visi RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah : "Terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" maka Visi RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Nganjuk,

mengarah pada tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018- 2023 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada misi ke 2 yaitu Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel *(accountable)* demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan

Hal ini menjabarkan letak geografis Kabupaten Nganjuk yang cukup strategis dan mempunyai potensi sumber daya alam yang belum maksimal dalam pengelolaannya, diantaranya adalah sector pertanian, sektor peternakan dan sektor pariwisata dan apabila ini dikelola secara optimal akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan kwalitas hidup yang layak kecukupan kebutuhan dasar yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja dengan didukung infrastruktur social budaya, ekonomi yang memadahi dengan tetap menjunjung keragaman budaya, nilai-nilai teleransi gotong royong dalam bingkai persaudaraan untuk memperkuat ikatan social masyarakat.

Adapun Misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban;
b. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) ;
c. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
d. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna ;
e. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata ;
f. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Sedangkan untuk Pemerintahan Kecamatan Sawahan akan menjabarkan Misi ke-2 yang dituangkan dalam program dan rencana kegiatan Kantor Kecamatan Sawahan.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dan pendorong program dan kegiatan OPD Kantor Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut :

A. Faktor Penghambat :
    1. Sarana prasarana kerja administrasi perkantoran
    2. Anggaran yang belum signifikan antara tugas pokok fungsi Kecamatan .
    3. Jumlah sumber daya Aparatur Sipil Negara yang belum sesuai kuantitas dengan beban kerja yang ada.
    4. Belum semuanya ASN mengikuti dan melaksanakan pendidikan dan latihan yang bersifat teknis.

B. Faktor Pendorong :

Mengingat Pemerintah Kecamatan merupakan ujung tombak dari Pemerintah Kabupaten yang merupakan pelaksana sebagian pendelegasi wewenang dari Bupati yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan OPD Tingkat Kabupaten dan Pemerintahan Desa sehingga juga merupakan unsur pembina dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam bidang Pembinaan Perangkat Desa, Lembaga Desa serta memfasilitasi Tata Kelola Administrasi Keuangan Desa dan membantu mengevaluasi, memonitoring kegiatan-kegiatan yang ada di Pemerintahan Desa maka factor pendorong sebagai berikut :

1. Berorientasi pelayanan yang lebih baik
2. Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan yang professional dan proporsional.
3. Efektivitas pembinaan, koordinasi, fasilitasi terhadap Pemerintahan Desa.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Sawahan, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan RenstraKementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.Demikian telaahan Renstra Kementerian/Lembaga agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

Disamping menelaah Renstra Kementerian/ Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sawahan harus difokuskan pada pencapaian tujuan misi ke-2 Bupati Nganjuk.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Nganjuk dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk adalah letak geografis Kecamatan

Sawahan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk termasuk wilayah pengembangan Kecamatan Sawahan sehingga Kecamatan Sawahan diharapkan dapat tumbuh baik dari sisi ekonomi.
Sebagai wilayah pengembangan Kecamatan Sawahan, Kecamatan Sawahan kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Sawahan merupakan wilayah yang produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

Hal ini sesuai dengan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 pada tujuan ke 16 yaitu Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

3.5 ISU-ISU STRATEGIS

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Sawahan bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi

kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan

kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Pemerintah Kecamatan Sawahan menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun sistem operasional dan prosedur untuk mencapainya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, diharapkan Pemerintah Kecamatan Sawahan dapat menyelaraskan antara potensi, peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN SAWAHAN

Tujuan dan strategi merupakan penjabaran atau implementasi Dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategi ini, maka Pemerintah Kecamatan Sawahan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Nganjuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan strategi yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja *(perfomance indikator)* yang terukur.

Adapun tujuan Pemerintah Kecamatan Sawahan adalah :

Meningkatnya sinergitas penyelengggaraan tugas-tugas Pemerintahan Kecamatan, dengan indikator yaitu berupa nilai sinergitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.

Sasaran Pemerintah Kecamatan Sawahan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
   Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta keamanan dan ketertiban.

   Indikator : Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti.

3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

   Indikator : Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 4.1

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO	Tujuan	Indikator	Data Capaian Th.Awal	Target Akhir Periode Restra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Th.Awal	Target					Target Akhir Periode Renstra
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaran pemerintahan kecamatan	2475,8	BAIK	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	85,69	85,70	85,72	85,7	85,78	86,00	86,00

					Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Adapun strategi yang diambil oleh pimpinan Kecamatan Sawahan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa antara lain :

1. Mengadakan koordinasi lintas Sektoral se wilayah Kecamatan Sawahan
2. Mengadakan Pembinaan terhadap Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan
3. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur di desa melalui MUSRENBANG, Program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
4. Memfasilitasi kesejahteraan masyarakat desa melalui Program RASKIN dan PKH/BLT
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun
6. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur
7. Pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan
8. Pemanfaatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal
9. Menyusun Monografi Desa sesuai dengan kondisi yang ada saat ini
10. Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Informatif

5.2 Kebijakan

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Sawahan, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan Tingkat Desa
3. Meningkatkan Administrasi Perkantoran Sesuai Dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
4. Efektifitas pelaksanaan musrenbang tingkat desa dan kecamatan dengan pendekatan perencanaan partisipatoris
5. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan Kinerja dan keuangan
6. Pengembangan pelayanan publik bersinergi dengan para *stakeholder*guna mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah
7. meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat serta

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari Setiap Misi

Visi : Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji) Bangun Desa Noto Kutho.			
Misi 2 : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan sinergitas penyelengggaraan tugas-tugas Kecamatan .	1. Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	1. Mengadakan survey tentang IKM terhadap pelayanan pada masyarakat	Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dan desa
	2. Meningkatnya efektivitas koordinasi tugas umum pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib.	2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dari Kecamatan sampai tingkat desa
		3. Melaksanakan pembinaan aparatur desa tentang tata	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai

		kelola pemerintahan desa dan administrasi keuangan yang baik dan benar 4. Melakukan monev dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinyuitas berberkelanjutan	peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Meningkatkan akuntabilitas dan transparasi system pelaporan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Sawahan selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Sawahan. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Sawahanakan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.

d. Program Peningkatan Disiplin aparatur
e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
g. Program Pembinaan Desa/Kelurahan

Namun demikian seiring dengan adanya perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, maka Program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Sawahan juga mengalami perubahan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota;
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan SAWAHAN

Kabupaten Nganjuk

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada periode Renstra SKPD	
								Th-1		Th-2		Th-3		Th-4		Th-5			
								2019		2020		2021		2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp

1	2	3	4	5	6	7		
1 Meningkatkan sinergis penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Kecamatan.	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi perkantoran	7	UNSUR KEWILAYAHAN				
			7 0 1	KECAMATAN SAWAHAN				
			7 0 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyaraka t (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	89,69%	89,69%	1
							146.650.000	2
							89,69%	3
							426.520.966	4
							89,69%	5
							2.224.106.000	6
							89,69%	7
							2.541.220.050	8
							89,69%	9
							2.495.411.550	10
							100%	11
							5.222.888.514	12

				7	0 1	0 1	2	0 1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Tersediany a Dokumen Perencana an dan Laporan Kinerja SKPD	100%	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	200.000	7 Dokumen	1.020.800	7 Dokumen	1.200.000	-	3.420.902.258
				7	0 1	0 1	2	0 1	0 1	Penyusunana dokumen perencanan perangkat daerah (Kec. sawahan)	Jumlah dokumen perencana an PD								1 Dokumen	171.150	2 Dokumen	200.000	-	-
				7	0 1	0 1	2	0 1	0 2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD								1 Dokumen	149.950	1 Dokumen	200.000	-	-

				7	0 1	0 1	2	0 1	0 3	Koordinasi dan penyusunan dokumen Peerubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen perubahan RKA-SKPD								1 Dokumen	149.950	1 Dokumen	200.000	-	-
				7	0 1	0 1	2	0 1	0 4	Koordinasi dan penyusunan dokumen DKA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD								1 Dokumen	199.900	1 Dokumen	200.000	-	-

				7	0 1	0 1	2	0 1	0 5	Koordinasi dan penyusunan dokumen Pwerubahan DKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen perubahan DPA-SKPD								1 Dokumen	149.950	1 Dokumen	200.000	-	-

				7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunann laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	200.000	2 Dokumen	199.900	2 laporan	200.000	100%	200.000
				7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediaanya Laporan Keuangan SKPD	100%	100%	1.500.000	100%	1.500.000		2.011.483.000	12 bulan	2.212.469.000	12 bulan	2.212.569.000		1.710.401.129

				7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN						100,00%	2.011.183.000	12 bulan	2.211.169.000	12 bulan	2.211.169.000	85%	1.710.301.129
				7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	200.000	1 Laporan	1.200.000	1 Laporan	1.200.000	0%	-

				7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/tribulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan bulanan/tribulan/semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	500.000	2 Laporan	500.000	2 Laporan	100.000	2 Laporan	100.000	12 Laporan	200.000	100%	100.000
				7	01	01	2	05		Adminstrasi Kepegawaian Daerah	Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	4.750.000	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	9.596.400	1 Laporan	15.596.400		0
				7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	-	19 ASN	4.750.000	20 ASN	8.000.000	22 ASN	9.596.400	22 Paket	9.596.400	-	-

				7	0 1	0 1	2	0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	-	-	-	-	0	-	-	6 Orang	6.000.000	-	-
				7	0 1	0 1	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediany a kebutuhan administrasi umum SKPD			48.700.000	12 bulan	105.570.966	12 bulan	72.436.000	12 bulan	71.636.500	12 bulan	73.330.050	12 bulan	21.924.590
				7	0 1	0 1	2	0 6	0 1	Penyediaa Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	1.400.000	5 Jenis	5.000.000	12 bulan	2.500.000	5 Jenis	2.500.000	5 Paket	2.500.000	36%	890.900

7	7	
0	0	
1	1	
1	1	
2	2	
0	0	
6	6	
0	0	
3	4	
Penyediaaan peralatan rumah tangga	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	
8 Jenis	1 Unit	
8 Jenis	1 Unit	2 Jenis
0	20.900.000	1.500.000
8 Jenis	1 Unit	2 Jenis
10.000.000	32.970.966	4.000.000
12 bulan	12 bulan	12 bulan
4.500.000	44.226.000	3.450.000
8 Jenis		2 Jenis
3.370.050	44.666.450	3.340.000
8 Paket	3 Paket	2 Paket
3.370.050	45.000.000	3.500.000
34%	37%	53%
1.512.800	16.335.800	1.835.090

7	7	7
0	0	0
1	1	1
1	1	1
2	2	2
0	0	0
6	6	6
0	0	0
3	4	5
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
		2 Jenis
		2 Jenis
		1.500.000
		2 Jenis
		4.000.000
		12 bulan
		3.450.000
		2 Jenis
		3.340.000
		2 Paket
		3.500.000
		53%
		1.835.090

				7	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	2.400.000	1 Jenis	3.600.000	12 bulan	3.000.000	1 Jenis	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	45%	1.350.000
				7	01	01	2	06	09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Orang	4 Orang	22.500.000	4 Orang	40.000.000	12 bulan	14.760.000	4 Orang	14.760.000	12 Laporan	9.000.000	0%	-
				7	01	01	2	06	10	Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD			0	1 Jenis	10.000.000	0	0		0	6 Dokumen	1.200.000	-	-
				7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah		4 Jenis	49.500.000	6 Jenis	95.000.000	1 Jenis	1.485.000	1 Jenis	49.494.900	6 Jenis	25.000.000		0

7	7	7	7
0	0	0	0
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
0	0	0	0
7	8	7	7
0	0	0	0
0	0	0	0
2	2	2	2
0	0	0	0
8	8	7	7
0	0	0	0
1	1	6	5
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Mebel
Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Tersediany a Jasa Penunjang SKPD	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan
	12 Bulan	3 Jenis	1 Jenis
	16.200.000	37.500.000	12.000.00
12 Bulan	12 Bulan	3 Jenis	3 Jenis
4.500.000	22.700.000	55.000.000	40.000.00
	12 Bulan		1 jenis
0	33.600.000	0	1.485.000
	12 Bulan		1 jenis
	33.600.000		49.494.90
12 Laporan	12 Bulan	4 Unit	2 Unit
600.000	34.200.000	16.000.000	9.000.000
			-
-	14.996.537		-

				7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan		4 Unit	16.200.000	4 Unit	18.200.000	12 bulan	33.600.000	12 Bulan	33.600.000	48 Laporan	33.600.000	45%	14.996.537
				7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanana Pemeliharaan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah		12 Bulan	28.750.000	12 Bulan	195.000.000	12 Bulan	96.902.000	12 Bulan	163.402.450	12 Bulan	139.276.100		54.664.000

				7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas koperasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		3 Kendaraan	25.000.000	3 Kendaraan	35.000.000	3 Kendaraan	33.100.300	3 kendaraan	33.100.300	3 Unit	40.000.000	58%	19.314.000
				7	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara				3 Jenis	7.000.000			5 jenis	2.500.000	5 Unit	3.500.000		
				7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		2 Unit	3.750.000	2 Unit	6.000.000	12 bulan	18.000.000	6 jenis	53.910.400	6 Unit	24.000.000	26%	4.750.000

				7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi				1 Unit	147.000.000	1 Unit	45.801.700	3 unit	73.891.750	4 Unit	71.776.100	67%	30.600.000
				7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan						100%	89.690.500	100%	75.702.000	100%	80.702.000	100%	246.094.500

				7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal.						12 bulan	87.760.500	3kegiatan	73.772.000	6 Laporan	73.772.000		
				7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordnasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait						12 bulan	87.760.500	3kegiatan	73.772.000	2 Dokumen	73.772.000	80%	69.848.000

				7	0 1	0 2	2	0 3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemelihara an sarana dan prasarana							-		0	2 kegiatan	5.000.000		-

				7	01	02	2	03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instasi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum						-		0	2 Dokumen	5.000.000		-
				7	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah warga yang mendapat pelayanan					2 kegiatan	1.930.000	2 kegiatan	1.930.000	2 kegiatan	1.930.000		965.000

				7	01	02	2	04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan						1 kegiatan	965.000	1 kegiatan	965.000	1 Laporan	965.000	100%	965.000
				7	01	02	2	04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahan						1 kegiatan	965.000	1 kegiatan	965.000	1 Laporan	965.000	0%	-
				7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan		10 Kegiatan	13.970.000	1 Kegiatan	11.620.000	12 bulan	122.925.000	18 kegiatan	55.755.000	15 kegiatan	51.670.000	15 Kegiatan	220.094.500
				7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan		10 Kegiatan	13.970.000	1 Kegiatan	11.620.000	12 bulan	122.925.000	18 kegiatan	55.755.000	15 kegiatan	51.670.000		

				7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		9 Kegiatan	2.350.000			12 bulan	22.415.000	13 kegiatan	39.085.000	8 Lembaga	35.000.000	50%	11.274.000

				7	01	03	2	01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		1 Kegiatan	11.620.000	1 Kegiatan	11.620.000	12 bulan	100.510.000	5 kegiatan	16.670.000	15 Dokumen	16.670.000	38%	38.505.000
				7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Bulan	34.750.000							3 kegiatan	21.000.000	3 kegiatan	21.000.000

				7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI		12 Bulan	34.750.000							3 kegiatan	21.000.000		
				7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hssil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Bulan	34.750.000							3 Laporan	21.000.000		

				7	0 1	0 5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan						12 bulan	26.080.000	12 kegiatan	24.176.700	440 orang	30.070.000		11.940.000			
				7	0 1	0 5	2	0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan						12 bulan	26.080.000	12 kegiatan	24.176.700	440 orang	30.070.000		11.940.000			

					7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						12 bulan	26.080.000	12 kegiatan	24.176.700	440 orang	30.070.000	46%	11.940.000

					7	0 1	0 6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				2 Kegiatan	10.500.000	12 bulan	38.412.500	12 kegiatan	41.567.500	15 kegiatan	59.567.500	15 kegiatan	139.547.500
					7	0 1	0 6	2	0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jml kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				2 Kegiatan	10.500.000	12 bulan	38.412.500	12 kegiatan	41.567.500	15 kegiatan	59.567.500		2.717.500
					7	0 1	0 6	2	0 1	0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa				2 Kegiatan	10.500.000	12 bulan	38.412.500	8 kegiatan	32.567.500	8 Dokumen	32.567.500	7%	2.717.500

					7	0 1	0 6	2	0 1	1 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							0	4 kegiatan	9.000.000	3 Dokumen	12.000.000		
					7	0 1	0 6	2	0 1	1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif							0			4 Dokumen	15.000.000		
					0	0	0	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Terlaksananya fungsi penunjang administrasi pemerintahan	17 Orang	12 bulan	16.900.000	17 Orang	15.000.000								

					2 0	0 1	2 0	3 9	0 1		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksana nya kegiatan pelayanan administra si perkantora n	17 Orang	12 bulan	16.900.000	17 Orang	15.000.000						
					2 0	0 1	2 0	3 9	0 1	1 7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksana nya kegiatan monitoring evaluasi danpeloran	17 Orang	17 Orang	16.900.000	17 Orang	15.000.000						
					2 0	0 1	2 0	3 9	4 9		Pemberdayaan Kelembagaan dan Masyarakat Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberday aan dan Masayarak at Keluharan											
					2 0	0 1	2 0	3 9	4 9	0 1	Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	Terwujudn ya profil desa dan kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan	4.700.000		0						

					20	01	20	39	49	02	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	Terciptanya penyediaan biaya peningkatan kewaspadaan terhadap gangguan trantibum				12 Bulan	25.750.000								
					20	01	20	39	49	03	Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan sosial	Terciptanya pembinaan kelompok sosial masyarakat				12 Bulan	30.500.000								
					20	01	20	39	49	03	Pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan pendapatan daerah				12 Bulan	34.850.000								

					2 0	0 1	2 0	3 9	4 9	0 3	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Terlaksananya pembelian alat pelayanan administrasi terpadu kecamatan	3 jenis	3 jenis	175.521.250	3 jenis	49.000.000								
					0 4	0 1	1 5	0 1	2 5		Pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau	Terlaksananya Taman Hijau Kecamatan	-	3 Bulan	50.000.000	-	-								
					0 4	0 1	1 5	0 1	2 5	0 1	Pembinaan lingkungan sehat	Terlaksananya Taman Hijau Kecamatan	-	3 Bulan	50.000.000	-	-								

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bahwa pada BAB VII ini dapat dijelaskan rincian Indikator Kinerja Utama yang merupakan penjabaran untuk menunjukkan kinerja perangkat daerah yang diarahkan untuk capaian lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk menjabarkan atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Sawahan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU), tabel terlampir
2. Indikator Kinerja Kunci (IKK), tabel terlampir

VII.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Sawahan adalah

1) Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan

Tabel. 7.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN SAWAHAN

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra
			Th.0 2018	Th 1 2019	Th.2 2020	Th.3 2021	Th.4 2022	Th.5 2023	
1	Nilai sinergitas penyelenggaran pemerintah kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasi kinerja perangkat kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan	2475,8	2477	2479	Baik	Baik	Baik	Baik

		5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintahan							

VII.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK)berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari OPD Kecamatan Sawahan adalah :

a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
b. Prosentase sarana/prasarana layak fungsi
c. Tingkat kehadiran ASN
d. Prosentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu
e. Prosentase pegawai dengan kategori nilai SKP Baik.
f. Tingkat efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan
g. Tingkat Efektivitas Pembinaan Pemerintah Desa

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Sawahan

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Th-0 2018	Th-1 2019	Th-2 2020	Th-3 2021	Th-4 2022	Th-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	85,69	85,70	85,72	85,76	85,78	86,00	86,00
2	Prosentase sarana/ prasarana layak fungsi	$\frac{\sum Prasarana\ Layak\ Fungsi}{\sum Seluruh\ Prasarana} x100\ \%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Tingkat kehadiran ASN	$\frac{\sum Kehadiran\ ASN}{\sum\ ASN} x100\ \%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\sum LaporanKinerjadanLaporanKeuanganyangtepatwaktu}{\sum Seluruh\ laporankinerjadankeuangan} x100\ \%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	$\frac{\sum ASN\ dengan\ Nilai\ SKP\ Baik}{\sum ASN} x100\ \%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah Kecamatan	$\frac{\sum Hasil\ Koordinasi\ di\ bidang\ tertentu}{\sum Seluruh\ Koordinasi} x100\ \%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Tingkat Efektifitas pembinaan desa/kelurahan	$\frac{\sum Pembinaanyangditindaklanjuti}{\sum Seluruh\ pembinaan} x100\ \%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII
PENUTUP

Rancangan akhirPerubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sawahan 2018-2023 berisi Tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Sawahan dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Nganjuk. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, Rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rancangan akhir Perubahan Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan kontrak kerja atau kesanggupan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja OPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

3. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Kondisi daerah, tugas dan fungsi SKPD, tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.
4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Rencana akhir perubahan rencana strategis
(RENSTRA) maka akan dilakukan penyesuaian.

Sawahan,10 Maret 2022

CAMAT SAWAHAN

SUKIRNO,S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690807 199003 1 010